

# RENSTRA

2021 – 2026



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
(DINSOSP2KB)**

Pemerintah Kota Pekalongan  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Jl. Sriwijaya No. 40 Telp. (0285) 422868 Pekalongan  
Email. [dinsosp2kb@gmail.com](mailto:dinsosp2kb@gmail.com)



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jl. Sriwijaya No. 40 Telp. (0285) 422868 Pekalongan 51111  
Email : [dinsosp2kb@gmail.com](mailto:dinsosp2kb@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 900 / 027 TAHUN 2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**

**PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas  
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan  
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan  
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 30  
Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
Pekalongan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Menyusun dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2021.

Ditetapkan di : Pekalongan  
pada tanggal : 8 Januari 2021

Plt. KEPALA  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN



**Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP 196308041987111001

Lampiran : Keputusan KEPALA DINSOSP2KB Kota Pekalongan  
Nomor : 900 / 027 Tahun 2021  
Tanggal : 8 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
DOKUMEN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala	Penanggung Jawab
2.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Ketua
3.	Pelaksana (Pengelola Program dan Kegiatan)	Sekretaris
4.	Sekretaris	Anggota
5.	Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

Plt. KEPALA  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKALONGAN



**Ir. BUDIYANTO, M.Pi, M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630804 198711 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinsosp2kb Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi Dinsosp2kb untuk 5 (lima) periode ke depan sebagai perwujudan tujuan yang sudah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, memuat tujuan, sasaran, serta Program dan Kegiatan yang menjadi kewajiban Dinsosp2kb sebagai leading sektor dalam urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan.

Dokumen Renstra ini disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan pusat dan/ atau Provinsi Jawa Tengah, penyesuaian terhadap RPJMD Kota Pekalongan, penyesuaian indikator serta penyesuaian hasil review Inspektorat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, semoga ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan sosial serta pelayanan KB kepada masyarakat kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Pekalongan, September 2021

Plt. Kepala Dinas Sosial,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Pekalongan



**Ir. Budiyanto, M.Pi, M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630804 198711 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN TABEL.....	iii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	7
1.4    Sistematika Penulisan.....	8
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
II.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
1.    Tugas dan Fungsi.....	10
2.    Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
II.2   Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
1.    Sumber Daya Manusia.....	24
2.    Sarana Prasarana Kerja.....	28
II.3   Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
II.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
1.    Tantangan.....	53
2.    Peluang.....	53
BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	56
III.1   Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
III.2   Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	59
III.3   Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota.....	61
1.    Kementrian Sosial.....	61
2.    Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).....	64
III.4   Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	66
III.5   Penentuan Isu-Isu Strategis.....	67
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....	71
IV.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	71
BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	74
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	75
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	124
BAB VIII  PENUTUP.....	126

## DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN TABEL

Bagan 1	: Bagan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan	12
Tabel 2.1	: SDM Berdasarkan Eselon Jabatan	24
Tabel 2.2	: SDM Berdasarkan Jumlah Personil	25
Tabel 2.3	: SDM Berdasarkan Pendidikan	26
Tabel 2.4	: SDM Berdasarkan Golongan Ruang	26
Tabel 2.5	: SDM Berdasarkan Diklat Penjurangan	27
Tabel 2.6	: Data Aset Tetap DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021	28
Tabel T-C.23	: Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSP2KB Tahun 2021	30
Tabel T-C.24	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINSOSP2KB	38
Tabel T-B.35	: Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran	56
Tabel 3.2	: Data PMKS Kota Pekalongan Tahun 2020	57
Tabel 3.3	: Data Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58
Tabel T-C.25	: Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DINSOSP2KB Kota Pekalongan	72
Tabel T-C.26	: Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan DINSOSP2KB Kota Pekalongan	73
Tabel T-C.27	: Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DINSOSP2KB Kota Pekalongan	76
Tabel T-C.28	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD	125



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3). Oleh sebab itu perlu Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada :

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Hasil rewiu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan;
3. Penyesuaian nama program, kegiatan dan sub kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dari Pusat dan Provinsi agar sesuai dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosp2kb) Kota Pekalongan maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2021-2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan, pagu indikatif beserta indikator kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas.

## **I.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14));
  39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
  40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
  41. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud memberikan penjabaran RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun kedepan, serta sebagai acuan resmi bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Atas dasar itu maka Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. menyediakan acuan resmi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pekalongan;
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KB Kota Pekalongan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan susunannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN**

Gambaran Pelayanan DINSOSP2KB Kota Pekalongan memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN**

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.



#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINSOSP2KB KOTA PEKALONAN**

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### **BAB VII PENUTUP**

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan di atas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

#### **1. Tugas dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan urusan sosial dan pengendalian penduduk di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk.

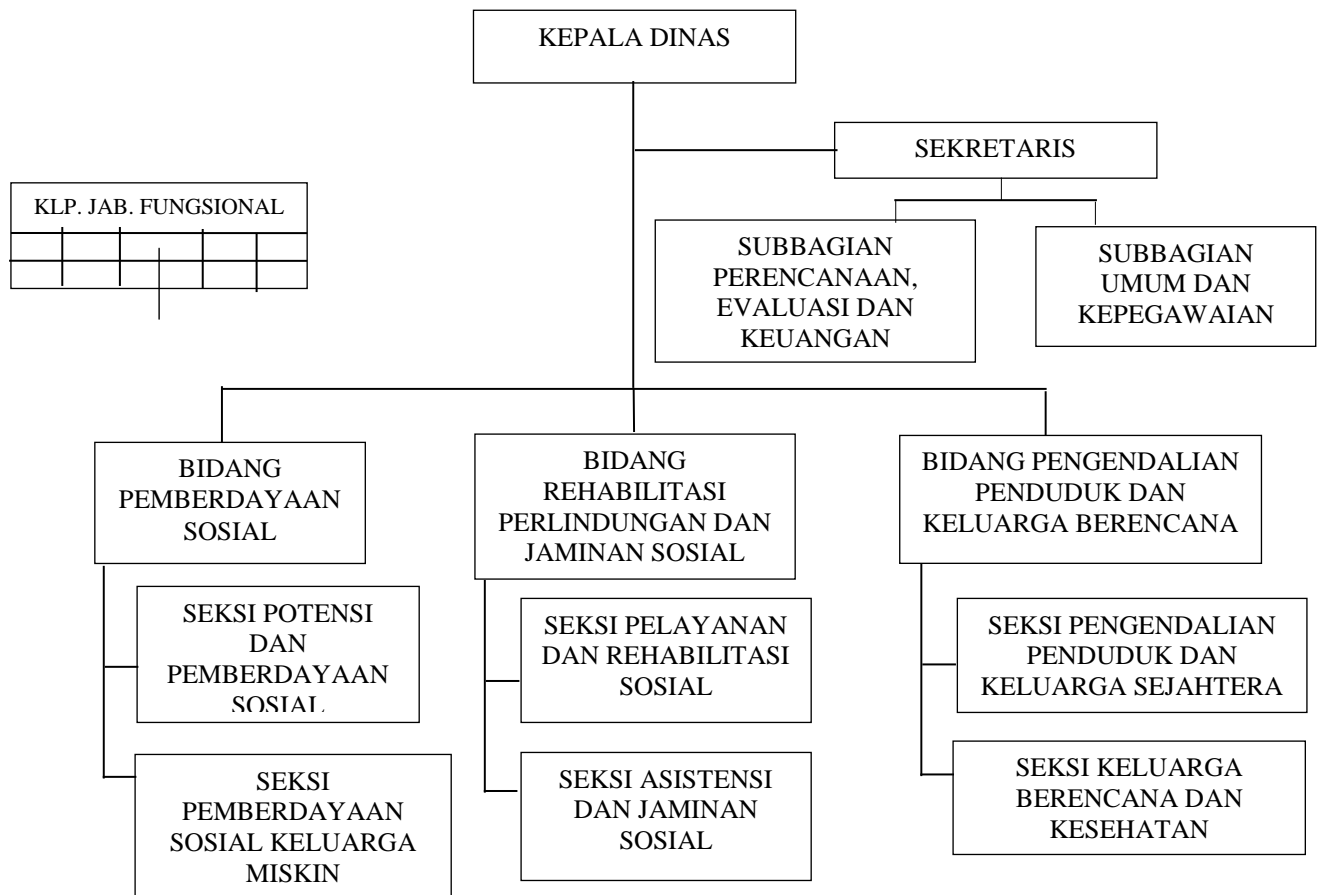
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- b. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- c. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang sosial;
- d. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- g. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- h. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

## 2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bagan 1 : Bagan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan



Jabatan eselon pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- |   |                |
|---|----------------|
| a. Kepala Dinas                                       | = Eselon II.b  |
| b. Sekretaris   | = Eselon III.a |
| c. Kabid Pemberdayaan Sosial                          | = Eselon III.b |
| d. Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial | = Eselon III.b |
| e. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | = Eselon III.b |
| f. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan         | = Eselon IV.a  |
| g. Kasubag Umum dan Kepegawaian                       | = Eselon IV.a  |
| h. Kasi Potensi dan Pemberdayaan Sosial               | = Eselon IV.a  |
| i. Kasi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin           | = Eselon IV.a  |
| j. Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial             | = Eselon IV.a  |
| k. Kasi Asistensi dan Jaminan Sosial                  | = Eselon IV.a  |
| l. Kasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera  | = Eselon IV.a  |
| m. Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan              | = Eselon IV.a  |

Secara lebih rinci tugas pokok dan fungsi dari masing- masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 71 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagai berikut :

**1) Kepala DINSOSP2KB,**

**Tugas pokok :**

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**Fungsi :**

- Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- Perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang sosial;

- d. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- g. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- h. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

## 2) Sekretariat

### 2.1) Sekretaris

#### **Tugas pokok :**

Menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan kearsipan.

#### **Fungsi :**

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana kerja dinas;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- c. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- d. penetapan pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan barang daerah;
- e. pengkoordinasian teknologi informasi di lingkungan dinas;
- f. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

## **2.2) Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan**

### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi keuangan.

### **Fungsi :**

- a) penyusunan rekapitulasi rencana kerja bidang-bidang
- b) pelaksanaan rekapitulasi penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c) penyusunan dan pengkoordinasian anggaran dan laporan keuangan;
- d) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPPTU) dan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP Nihil);
- e) penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan serta fungsi akuntansi;
- g) pelaksanaan evaluasi penyusun, penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- h) pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
- i) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **2.3) Kasubag Umum dan Kepegawaian**

#### **Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

#### **Fungsi :**

- a) Penyusunan rencana kerja di bidang ketatausahaan;
- b) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tata laksana, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
- c) Menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- d) Pengumpulan, mengolah dan melaporkan administrasi kepegawaian;
- e) Pelaksana kegiatan teknologi informasi;
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

### **3) Bidang Pemberdayaan Sosial**

#### **3.1) Kabid Pemberdayaan Sosial**

#### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi potensi dan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin.

#### **Fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang;
- b. pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang potensi dan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan sosial keluarga miskin;
- d. pembinaan dan pengembangan lembaga sosial di bidang kesejahteraan;
- e. peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, karang taruna dan organisasi sosial bidang kesejahteraan;



- g. pelaksanaan pembinaan, motivasi lembaga sosial dan bantuan sosial kepada pekerja sosial masyarakat, wahana kerja sosial berbasis masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- h. pelaksanaan pelatihan dan ketrampilan anak jalanan, penyandang disabilitas dan korban NAPZA;
- i. penanggulangan kemiskinan perkotaan);
- j. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- k. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **3.2) Kasi Potensi dan Pemberdayaan Sosial**

#### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial.

#### **Fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja dan program kerja seksi;
- b. pembinaan dan pemberdayaan karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- c. pembinaan dan pengembangan tenaga kesejahteraan sukarela dan pekerja sosial masyarakat;
- d. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- e. pengarusutamaan gender bidang kesejahteraan sosial;
- f. pembinaan, bimbingan sosial dan fasilitasi kader perempuan bidang kesejahteraan sosial;
- g. pemberdayaan dan kerja sama dunia usaha;
- h. pembinaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat;
- i. pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi kinerja lembaga sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM);
- j. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **3.3) Kasi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin**

#### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial.

#### **Fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja seksi;
- b. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu;
- c. peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi;
- d. pemberdayaan sosial komunitas miskin;
- e. penanggulangan kemiskinan perkotaan;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial keluarga mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan;
- g. penyiapan bimbingan teknis tenaga penyuluh kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan pelatihan ketrampilan anak jalanan, penyandang disabilitas dan korban NAPZA;
- i. penyiapan bahan dan pemberian rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlawan/ perintis kemerdekaan serta melakukan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- j. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **4) Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial.**

##### **4.1) Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

###### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinsos P2KB yang meliputi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Asistensi dan Jaminan Sosial.

###### **Fungsi :**

- a) penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang;
- b) pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;
- c) pengkoordinasian dengan instansi terkait dengan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial;
- d) pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah;
- e) pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi sosial terhadap eks PGOT, eks napi eks WTS dan ODHA;
- f) pembinaan, pencegahan dan penjangkaran terhadap PGOT, WTS, anak jalanan, tuna susila dan lainnya;
- g) penanganan anak dan remaja terlantar;
- h) pelaksanaan pemberian bantuan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- i) pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan sumbangan sosial dan penarikan undian;
- j) pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak/ adopsi anak;
- k) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **4.2) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

##### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

##### **Fungsi :**

- a. penyusunan rencana kerja dan program kerja seksi;
- b. pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial anak, remaja terlantar dan penyandang cacat dalam panti maupun luar panti;
- c. pembinaan dan pemberdayaan penyandang cacat;
- d. pencegahan dan rehabilitasi terhadap eks PGOT, eks napi, eks WTS, anak eks korban narkoba;
- e. pelaksanaan pencegahan dan penjarangan terhadap PGOT, WTS, anak jalanan dan lain-lain;
- f. peringatan hari anak, hari lansia dan hari Disabilitas Internasional;
- g. pemberian bimbingan tentang pengangkatan/ adopsi anak;
- h. pemberian bantuan lansia;
- i. pengkoordinasian dengan instansi/ lembaga terkait;
- j. pembinaan/ monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

#### **4.3) Kasi Asistensi dan Jaminan Sosial**

##### **Tugas pokok :**

melaksanakan sebagian tugas bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

##### **Fungsi :**

- a) penyusunan rencana kerja seksi;
- b) pemberian bantuan dan jaminan sosial terhadap korban tindak kekerasan, perlakuan salah, pekerja migran bermasalah, keluarga fakir miskin, penyandang masalah cacat berat dan orang terlantar;
- c) pemberian bantuan dan perlindungan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial;
- d) perlindungan sosial, korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- e) pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

- f) pengkoordinasian dan fasilitasi program keluarga harapan;
- g) pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan sumbangan sosial dan penarikan undian;
- h) pelaksanaan asuransi kesejahteraan sosial;
- i) pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan para korban bencana alam dan bencana sosial dan jaminan sosial, asuransi kesejahteraan sosial dan lainnya;
- j) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **5.1) Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

#### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinsos P2KB yang meliputi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

#### **Fungsi :**

- a) penyusunan program kerja di bidang pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- b) penyusunan bahan kebijaksanaan fasilitasi, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- c) penyusunan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan advokasi komunikasi informasi edukasi (KIE) dan pelayanan keluarga berencana;
- e) pengkoordinasian pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- f) pengelolaan dan penganalisaan data statistik pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- g) perencanaan pelaksanaan penerapan dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;

- h) perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i) pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5.2) Kasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**

### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Pengendalian Penduduk dan keluarga sejahtera.

### **Fungsi :**

- a) Penyusunan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- b) Penyusunan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah/kota;
- c) Penyusunan kegiatan dan rencana kerja urusan Keluarga Sejahtera yang mencakup upaya pembinaan ketahanan keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia;
- d) Penyusunan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan strata keluarga;
- e) Perancangan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan keluarga;
- f) Penyusunan pengumpulan pengolahan dan pendokumentasian laporan-laporan data laporan umpan balik hasil pelaksanaan kegiatan program-program pada bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g) Penyusunan konsep-konsep kebijakan operasional informasi keluarga dan analisis program meliputi penilaian, pendokumentasian, pelayanan informasi dan pelaporan program-program pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h) Pelaksanaan penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan program-program pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i) Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Keluarga pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j) Penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **5.3) Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

#### **Tugas pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas urusan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

#### **Fungsi :**

- a) penyusunan kegiatan dan rencana kerja urusan Keluarga Berencana;
- b) pelaksanaan penyusunan program dan kebijakan operasional serta pengendalian Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c) Penyusunan kebijakan operasional Program KB dan Kesehatan Reproduksi;
- d) penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional KB dan Kesehatan Reproduksi sehingga sesuai dengan kondisi wilayahnya;
- e) penyusunan upaya – upaya tercapainya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional KB dan Kesehatan Reproduksi dengan lembaga dan dinas terkait;
- f) penyusunan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional KB dan Kesehatan Reproduksi;
- g) pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- j) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya .

## II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinsosp2kb Kota Pekalongan memiliki Pegawai sebanyak 49 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, sebagaimana tabel berikut :

#### a. Perincian Berdasarkan Eselon Jabatan

Tabel 2.1 : SDM berdasarkan Eselon Jabatan

NO	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum/ Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kabid Pemberdayaan Sosial	-	-	1	-	-	1
4	Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	1	-	-	1
5	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	1	-	-	1
6	Kasubag Renval dan Keuangan	-	-	-	1	-	1
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1
8	Kasi Potensi dan Pemberdayaan Sosial	-	-	-	1	-	1
9	Kasi Pemberdayaan Sosial	-	-	-	1	-	1
10	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	-
11	Kasi Asistensi dan Jaminan Sosial	-	-	-	1	-	1
12	Kasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	-	-	-	1	-	1
13	Kasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	1	-	1



NO	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum/ Pelaksana	Jumlah
14	Jabatan Fungsional (PLKB)					18	18
15	Jabatan Fungsional (Pranata Komputer Pertama)					1	1
16	Pelaksana					9	9
<b>JUMLAH</b>				<b>4</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>39</b>

b. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

Tabel 2.2 : SDM berdasarkan Jumlah Personil

No	Pegawai	Jumlah		
		Pria	Wanita	Total
1	PNS	17	22	39
2	Non PNS			
	<i>a. Sopir Kepala Dinas</i>	1	0	1
	<i>b. Petugas Administrasi</i>	7	7	14
	<i>c. Penjaga Kantor</i>	2	0	2
	<i>d. Pendamping KUBE</i>	3	3	6
	<i>e. Pendamping TKSK</i>	4	0	4
	<i>f. Tenaga Kebersihan TMP</i>	2	0	2
	<i>g. Petugas Technical Asisten</i>	1	0	1
	<i>h. Petugas Pengelola Informasi</i>	0	1	1
	<i>i. Front Office SLRT</i>	0	3	3
	<i>j. Operator System DTKS</i>	2	0	2
	<i>k. Petugas Pemelihara aplikasi SLRT</i>	2	0	2
	<i>l. Pengelola RPSBM</i>	17	13	30
	<i>m. Petugas Distribusi Alokon</i>	1	0	1
	<i>n. Pendamping PKH</i>	12	23	35
<i>Total</i>		71	72	143

c. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3 : SDM berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	1	2	3
4.	Kasi / Kasubag	-	-	1	-	4	2	7
5	Kelompok Jabatan Fungsional (PLKB)	-	-	-	1	7	10	18
6	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	1	3	1	3	1	10
7	Non PNS	1	1	41	2	23	1	69
8	Pendamping PKH	-	-	-	2	29	3	35
Jumlah		2	2	45	6	66	19	143

d. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.4 : SDM berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	1	2	3
4.	Kasi / Kasubag	-	-	6	1	7
5.	Kelompok Jabatan Fungsional (PLKB)	-	-	15	3	18
6.	Fungsional Umum/ Pelaksana	1	2	7	-	10
Jumlah		1	2	28	6	39

e. Perincian Berdasarkan Diklat Penjurangan

Tabel 2.5 : SDM berdasarkan Diklat Penjurangan

NO	JABATAN	DIKLAT PIM (ADUM/ADUMLA/SPAMA)			
		II	III	IV	Belum
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-	-
3.	Kepala Bidang	-	1	1	1
4.	Kasi / Kasubag	-	-	5	2
5	Kelompok Jabatan Fungsional (PLKB)	-	-	-	-
6	Fungsional Umum/ Pelaksana	-	-	-	10

## 2. Sarana Prasarana Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan. Adapun Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Data Aset Tetap DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021

NO	URAIAN	Jumlah Unit	Nilai Buku
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>		<b>13.897.812.586.88</b>
<b>1</b>	<b>TANAH</b>		<b>3.692.978.500,-</b>
01	Tanah	9	3.692.978.500,-
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>7.908.936.586.66</b>
02	Alat-alat Besar	1	14.650.000,00
03	Alat-alat Angkutan	68	4.077.472.613,70
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
05	Alat Pertanian	16	142.300.000,00
06	Alat Kantor dan rumah Tangga	706	753.725.694,00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	142	590.775.058,46
08	Alat-alat Kedokteran	61	595.018.967,00
09	Alat Laboratorium	191	625.000,00,-
10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-	-
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>10.094.605.282,-</b>
01	Bangunan Gedung	26	9.083.225.282,-
02	monumen	2	1.011.380.000,-
<b>4</b>	<b>JALAN</b>		<b>124.969.858,-</b>
01	Jalan dan Jembatan	2	29.575.000,-
02	Bangunan Air dan Irigasi	1	1.600.000,-
03	Instalasi	-	-
04	Jaringan	7	93.794.858,-
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>18.237.500,-</b>
01	Buku dan Perpustakaan	9	807.500,-
02	Tanaman	42	17.430.000,-
<b>7</b>	<b>AKUMULASI PEYUSUTAN</b>		<b>(7.941.915.162,78)</b>
01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(6.298.193.068,66)

02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.614.365.182,12)
03	Akumulasi Penyusutan Jalan		(29.356.912,00)

Sumber : Data Inventaris Barang/Sensus Barang Milik Daerah DINSOSP2KB Kota Pekalongan Semester II Tahun 2020

### II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan kondisi aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan tersebut, terutama pada kondisi kawasan rawan bencana alam maka kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan berdasarkan Sasaran dan Target Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

Dalam pencapaian sasaran dan target pada Renstra Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan harus memperhatikan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Dinsosp2kb pada tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator yang terbagi atas Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Program Rutin yang menjadi kewenangan Dinsosp2kb Kota Pekalongan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel T-C 2.3 berikut :

**Tabel T-C 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Pekalongan**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Urusan Sosial</b>											
1.	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	%	n/a	1.33	1.50	-	1.30	1.57	1.57	1.66	Akan tercapai
	- Jumlah fasilitasi kegiatan BPNT yang dilaksanakan	Bulan		12		12		12			
	- Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun	Dokumen		1		1		1			
	- Jumlah bulan pelayanan SLRT	Bulan		12		12		6			
	- Jumlah Bulan Pendampingan KUBE	Bulan		12		12		12			
2.	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	%	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
3.	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial	%	-	23.41	30.22	-	39.35	46.72	46.72	37.02	tercapai
	- Jumlah veteran dan ahli waris veteran yang mendapat bantuan	Orang		87		87		87			
	- Jumlah Lansia yang mendapat bantuan sembako	Orang		600		600		600			
	- jumlah Disabilitas yang	Orang		0		225		225			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	mendapat sembako										
	- jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu	Orang				20		20			
	- fasilitasi UPPKSAI	Kegiatan				1		1			
	- jumlah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam	kegiatan				1		1			
	- Jumlah kelayan yang dilayani	Orang				118		148			
	- Jumlah kegiatan fasilitasi HUT Lansia	Kegiatan				1		1			
	- Jumlah KPM PKH yang diberikan sosialisasi	KPM				400		400			
	- Jumlah bulan fasilitasi Pendampingan PKH	Bulan				6		6			
	- Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM	Bulan				12		12			
4.	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	%	-	58.33	66.67	-	75.00	75.00	75.00	75.00	tercapai
	Jumlah bulan Pemeliharaan TMP	Bulan				12		12			
	Jumlah bulan penyediaan jasa TKSK	Bulan				12		12			
	Jumlah rakor PSKS yang dilaksanakan	Kali				3		3			
	Jumlah rakor LKKS yang dilaksanakan	Kali				3		3			
	Jumlah monitoring pembinaan LKKS yang dilaksanakan	Lokasi				27		27			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Pekerjaan Rehab TMP yang dilaksanakan	pekerjaan				1					
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>											
1.	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus	%	n/a	77.78	88.89	-	69.33	101.11	101.11	100.00	tercapai
2.	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	%	n/a	62	64	22	20.51	19.30	19.30	66.00	belum tercapai
	- Jumlah kegiatan pelayanan KB serempak	Kegiatan		5		5		5			
	- Jumlah media informasi Pelayanan KIE	Media		3		2		2			
	- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR	PIK		51		51		51			
	- Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun	Dokumen		1		1		1			
	- Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang dilaksanakan	Kegiatan		3		3		3			
	- Jumlah mobil Mupen yang diadakan	Unit		0		1		1			
	- Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun	dokumen		14		14		14			
	- jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB	bulan		12		12		12			



No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Rutin</b>											
1.	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan				12		12			
-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan				12		12			
-	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan				12		12			
-	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan				12		12			
-	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan				12		12			
-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan				12		12			
-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan				12		12			
-	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan				12		12			
-	jumlah bulan penyediaan	bulan				12		12			

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan										
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan				11		11			
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali				194		167			
2.	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- jumlah dokumen perencanaan gedung	dokumen				1		1			
	- jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala	unit		1		1		1			
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit		68		69		69			
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit				25		24			
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan		12		12		12			
3.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0.00	100.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
-	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen				6		6			
-	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen				6		6			
-	jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SKPD	bulan				12		12			
-	jumlah dokumen SPIP yang disusun	dokumen				5		5			

Berdasarkan Hasil Evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Dinsosp2kb sampai dengan Tahun 2020 pada urusan Sosial, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dan Program Rutin, dengan total indikator sebanyak 9 (Sembilan) Indikator, yang merupakan Indikator Program dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

### **1. Urusan Sosial**

Indikator Outcome pada urusan ini ada 4 (empat Indikator) yaitu :

1. Persentase Keluarga miskin yang diberdayakan;
2. Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)
3. Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial
4. Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif

Keempat Indikator yang menjadi urusan Sosial tersebut tiga diantaranya telah tercapai sedang 1 (satu) indikator yaitu Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan diharapkan akan tercapai pada akhir tahun Renstra (tingkat capaian 90-100 persen)

### **2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pada Program ini terdapat 2 (dua) Indikator Outcome yaitu :

1. Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus
2. Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia

Dari 2 (dua) Indikator tersebut 1 (satu) tidak tercapai yaitu pada Indikator Persentase kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia hal ini disebabkan adanya kesalahan penempatan target yaitu 64 persen, yang seharusnya target tersebut digunakan untuk target Jumlah Peserta KB Aktif namun digunakan untuk target kepesertaan KB MKJP, pada saat perubahan target pada tahun 2020 sudah di usulkan untuk perubahan target kepesertaan KB MKJP yaitu sebesar 22 persen, namun untuk akhir periode Renstra sebelumnya target masih tercatat sesuai dengan target pada peserta KB Aktif, sehingga tingkat ketercapaian sangat rendah yaitu sebesar 19.30 persen,

sehubungan dengan hal tersebut tingkat ketercapaian pada indikator ini adalah tidak tercapai.

### **3. Program Rutin**

Indikator Outcome pada program ini ada 3 (tiga) yaitu :

1. Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi
2. Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
3. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Ketiga indikator dalam Program Rutin tersebut telah tercapai dengan realisasi capaian sebesar 100 persen.

Dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang tepat, efektif dan efisien maka evaluasi capaian anggaran pada masa periode sebelumnya juga diperlukan dalam pengambilan kebijakan kebutuhan perencanaan pada periode selanjutnya, capaian anggaran pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan pada masa periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel T-C.24 berikut :

Tabel T-C.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Kota Pekalongan  
 Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
<b>Urusan Sosial</b>																	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		595,860,000.00	685,600,000.00	690,100,000.00	681,000,000.00		525,992,847.00	637,628,091.00	647,722,717.00	492,919,305.00		91.73	92.98	95.75	91.45	0.05 %	-0.003 %
Penyediaan jasa surat menyurat		2,400,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00		1,950,000.00	2,992,000.00	2,400,000.00	1,500,000.00		81.25	99.73	100.00	62.50		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		137,460,000.00	130,900,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00		79,109,475.00	89,845,592.00	109,287,539.00	118,790,679.00		57.55	68.64	73.84	80.26		
Penyediaan jasa administrasi keuangan		32,000,000.00	35,000,000.00	48,200,000.00	48,300,000.00		31,916,000.00	34,800,000.00	48,000,000.00	45,600,000.00		99.74	99.43	99.59	94.41		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Penyediaan jasa kebersihan kantor		29,000,00 0.00	58,000,00 0.00	58,000,00 0.00	65,200,00 0.00		26,504,00 0.00	57,810,00 0.00	57,700,00 0.00	65,182,00 0.00		91. 39	99. 67	99. 48	99. 97		
Penyediaan alat tulis kantor		45,000,00 0.00	40,000,00 0.00	40,000,00 0.00	40,000,00 0.00		44,836,50 0.00	39,992,50 0.00	39,999,10 0.00	28,000,00 0.00		99. 64	99. 98	100 .00	100 .00		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	9,999,275. 00	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		100 .00	99. 99	100 .00	100 .00		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		7,500,000. 00	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		7,475,500. 00	7,322,000. 00	9,996,500. 00	9,981,000. 00		99. 67	73. 22	99. 97	99. 81		
Penyediaan peralatan rumah tangga		3,500,000. 00	5,000,000. 00	3,500,000. 00	5,000,000. 00		3,500,000. 00	4,985,000. 00	3,500,000. 00	4,997,500. 00		100 .00	99. 70	100 .00	99. 95		
Penyediaan bahan bacaan		2,500,000. 00	3,000,000. 00	2,500,000. 00	2,500,000. 00		2,411,500. 00	2,553,500. 00	2,140,000. 00	2,100,000. 00		96. 46	85. 12	85. 60	84. 00		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
dan peraturan perundang-undangan																	
Penyediaan makanan dan minuman	47,500,00 0.00	60,000,00 0.00	47,500,00 0.00	60,000,00 0.00	39,636,00 0.00	58,778,00 0.00	45,093,60 0.00	53,218,25 0.00	83.44	97.96	94.93	85.88					
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	279,000,00 00.00	330,700,00 00.00	320,000,00 00.00	289,600,00 00.00	278,653,872.00	328,550,224.00	319,605,978.00	153,549,876.00	99.88	99.35	99.88	99.19					
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>622,000,00 00.00</b>	<b>1,935,615,000.00</b>	<b>3,376,238,000.00</b>	<b>943,476,000.00</b>	<b>561,818,050.00</b>	<b>1,892,230,514.00</b>	<b>3,301,715,346.00</b>	<b>720,173,374.00</b>	<b>92.28</b>	<b>94.88</b>	<b>93.00</b>	<b>89.67</b>	<b>0.71</b>	<b>0.78</b>			
Pembangunan Gedung Kantor	300,000,00 00.00	1,458,791,000.00	2,853,800,000.00	500,000,000.00	287,570,000.00	1,438,126,000.00	2,851,849,999.00	389,691,425.00	95.86	98.58	99.93	91.69					
Pemeliharaan	15,000,00	25,000,00	32,000,00	25,000,00	14,570,00	21,691,50	30,734,00	9,408,000.	97.	86.	96.	75.					



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
aan rutin/berkala gedung kantor		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		13	77	04	26		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		152,000,00.00	199,224,00.00	263,438,00.00	245,476,00.00		109,948,685.00	184,886,314.00	216,441,947.00	223,843,949.00		72.33	92.80	82.16	86.06		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		135,000,00.00	220,600,00.00	200,000,00.00	146,000,00.00		129,729,365.00	216,069,500.00	175,989,400.00	78,820,00.00		96.10	97.95	87.99	97.91		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		20,000,00.00	32,000,00.00	27,000,00.00	27,000,00.00		20,000,00.00	31,457,200.00	26,700,00.00	18,410,00.00		100.00	98.30	98.89	97.41		
<b>Program peningkatan</b>		<b>28,500,00.00</b>	<b>33,000,00.00</b>	<b>33,000,00.00</b>	<b>24,500,00.00</b>		<b>19,370,800.00</b>	<b>30,380,00.00</b>	<b>29,336,00.00</b>	<b>20,194,00.00</b>		<b>70.43</b>	<b>91.67</b>	<b>89.03</b>	<b>82.13</b>	<b>-0.033</b>	<b>0.074</b>

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
<b>pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																	
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00		6,670,800.00	7,790,000.00	7,550,000.00	6,500,000.00		83.39	97.38	94.38	81.25		
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00		5,176,000.00	7,690,000.00	7,344,000.00	5,494,000.00		64.70	96.13	91.80	68.68		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Laporan Keuangan SKPD																	
Monitoring dan Evaluasi SKPD		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	8,500,000.00		5,000,000.00	4,200,000.00	4,250,000.00	8,200,000.00		100.00	84.00	85.00	96.47		
Penyusunan Revisi Renstra SKPD		7,500,000.00					2,524,000.00					33.65					
Penyusunan Profil Perangkat Daerah			12,000,000.00	12,000,000.00				10,700,000.00	10,192,000.00				89.17	84.93			
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah</b>		601,400,000.00	747,590,000.00	880,000,000.00	782,480,000.00		593,635,000.00	728,320,000.00	866,684,000.00	736,017,500.00		97.42	98.21	98.78	99.85	<b>0.10</b>	<b>0.09</b>

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
<b>Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>																	
Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga		121,400,000.00	122,000,000.00	-	-		115,636,000.00	121,250,000.00				95.25	99.39				
Validasi data penduduk miskin		480,000,000.00	625,590,000.00	-	-		477,999,000.00	607,070,000.00				99.58	97.04				
Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		-	-	750,000,000.00	632,180,000.00				737,744,000.00	585,820,000.00				98.37	99.77		
Optimalisasi Pendampingan Program KUBE		-	-	130,000,000.00	150,300,000.00				128,940,000.00	150,197,500.00				99.18	99.93		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		370,100,000.00	1,605,256,000.00	2,815,900,000.00	2,580,385,000.00		362,745,000.00	1,346,480,886.00	2,476,426,100.00	2,000,056,370.00		96.90	92.31	91.14	89.61	1.33	1.12
Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat		46,800,000.00	140,000,000.00	475,000,000.00	427,500,000.00		46,756,000.00	138,680,000.00	458,780,600.00	325,206,670.00		99.91	99.06	96.59	86.15		
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi abak terlantar termasuk anak jalanan, anak		29,000,000.00	50,200,000.00	-	-		29,000,000.00	49,900,000.00	-	-		100.00	99.40	-	-		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
cacat, dan anak nakal																	
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		33,500,00 0.00	110,000,00 00.00	333,900,00 00.00	253,000,00 00.00		30,200,00 0.00	109,794,00 00.00	309,889,40 00.00	53,850,00 0.00		90.15	99.81	92.81	89.16		
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		100,000,00 00.00	587,942,00 00.00	475,000,00 00.00	361,385,00 00.00		99,900,00 0.00	362,683,00 00.00	219,014,00 00.00	221,538,70 00.00		99.90	61.69	46.11	73.85		
Fasilitas Kelayan		25,800,00 0.00	60,000,00 0.00	75,000,00 0.00	76,500,00 0.00		23,439,00 0.00	50,568,00 0.00	67,745,00 0.00	59,989,00 0.00		90.85	84.28	90.33	99.98		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)		55,000,00 0.00	419,114,0 00.00	55,000,00 0.00			54,000,00 0.00	403,656,0 00.00	54,800,00 0.00			98. 18	96. 31	99. 64			
Peringatan Hari Ibu		80,000,00 0.00	68,000,00 0.00				79,450,00 0.00	63,342,00 0.00				99. 31	93. 15				
Komisi Daerah Lanjut Usia				40,000,00 0.00	60,000,00 0.00				39,800,00 0.00	17,070,00 0.00				99. 50	81. 09		
Fasilitasi Nikah Massal				60,000,00 0.00					59,958,20 0.00					99. 93			
Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga				452,000,0 00.00	452,000,0 00.00				447,372,9 00.00	344,162,0 00.00				98. 98	98. 76		
Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembaga				850,000,0 00.00	950,000,0 00.00				819,066,0 00.00	978,240,0 00.00				96. 36	98. 32		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
an sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)																	
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		1,616,000,000.00	2,050,697,000.00	923,571,000.00	320,000,000.00		1,507,857,840.00	1,994,205,000.00	893,698,000.00	237,077,000.00		94.18	97.39	95.58	98.04	-0.31	-0.32
Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan		91,000,000.00	95,000,000.00	85,000,000.00	75,000,000.00		88,920,000.00	94,300,000.00	75,350,000.00	72,382,000.00		97.71	99.26	88.65	97.15		
Optimalisasi pendampingan Program		105,000,000.00	120,000,000.00				102,500,000.00	112,090,000.00				97.62	93.41				



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
KUBE																	
Komisi daerah lanjut usia		100,000,000.00					99,400,000.00					99.40					
Fasilitasi Khitanan Masal		50,000,000.00					49,875,000.00					99.75					
Fasilitasi Nikah Masal		90,000,000.00					73,522,540.00					81.69					
Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM		745,000,000.00	980,000,000.00				679,901,300.00	956,277,000.00				91.26	97.58				
Penyediaan Jasa TKSK		55,000,000.00	112,000,000.00	115,000,000.00	125,000,000.00		49,058,000.00	112,000,000.00	114,300,000.00	121,500,000.00		89.20	100.00	99.39	97.20		
Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		150,000,000.00	155,000,000.00	250,000,000.00	120,000,000.00		139,925,000.00	151,240,000.00	241,514,000.00	43,195,000.00		93.28	97.57	96.61	99.76		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Rehab taman makam pahlawan		-	588,697,000.00	473,571,000.00		-	-	568,298,000.00	462,534,000.00		-		96.53	97.67	-		
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																	
<b>Program Keluarga Berencana</b>		1,755,212,000.00	2,384,616,000.00	2,634,437,000.00	2,833,152,000.00		1,663,440,430.00	2,270,537,438.00	2,470,928,796.00	2,019,642,726.00		95.59	94.87	94.16	88.30	0.18	0.09
Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin		310,000,000.00	310,000,000.00	341,500,000.00	324,000,000.00		307,930,000.00	273,248,000.00	277,569,800.00	160,019,152.00		99.33	88.14	81.28	85.73		
Pelayanan KIE		106,500,000.00	90,000,000.00	200,290,000.00	165,000,000.00		104,680,000.00	85,080,000.00	183,890,000.00	69,380,000.00		98.29	94.53	91.81	92.51		
Pendataan Keluarga Sejahtera		180,000,000.00	110,000,000.00	70,620,000.00	61,920,000.00		165,100,000.00	101,160,000.00	69,418,200.00	37,128,000.00		91.72	91.96	98.30	98.74		
Penguatan Kelembagaan		257,440,000.00	331,160,000.00	327,370,000.00	252,700,000.00		255,440,000.00	316,582,700.00	315,638,000.00	94,720,000.00		99.22	95.60	96.42	63.15		

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Keluarga Kecil Berkualitas																	
Penguatan Program Keluarga Berencana / KB (DAK)		510,472,000.00	614,206,000.00	736,050,000.00	750,000,000.00		507,603,680.00	614,053,760.00	712,691,000.00	729,204,500.00		99.44	99.98	96.83	99.21		
Penyusunan Informasi Kependudukan dan Keluarga		30,000,000.00	50,000,000.00	41,644,000.00	36,184,000.00		30,000,000.00	49,700,000.00	41,464,000.00	24,154,000.00		100.00	99.40	99.57	100.00		
Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)		360,800,000.00	879,250,000.00	916,963,000.00	1,243,348,000.00		292,686,750.00	830,712,978.00	870,257,796.00	905,037,074.00		81.12	94.48	94.91	78.78		

Dari tabel T-C.24 tersebut di atas dilihat bahwa anggaran pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan baru ada pada tahun ke 2 (dua) yaitu tahun 2017, sedang tahun ke 1 (satu) yaitu tahun 2016 Anggaran pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan belum ada, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan belum di bentuk, urusan Sosial pada saat itu menjadi kewenangan Dinsosnakertrans, sedang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih menjadi kewenangan DPMP2AKB.

Capaian anggaran pada renstra periode sebelumnya juga cukup bagus, hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran pada Program yang diampu Dinsosp2kb dari tahun 2017 sampai tahun 2020, serapan terendah terdapat pada Program Keluarga Berencana tahun 2020 yaitu sebesar 88.30 persen hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19, dan kebijakan Pemerintah Pekalongan yang membatasi adanya pertemuan-pertemuan tatap muka, sehingga banyak kegiatan baik rapat, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang tidak dapat direalisasikan, sedang serapan anggaran tertinggi terdapat pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya yaitu sebesar 99.85 persen.

#### **II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utama berkaitan dengan kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Renstra Kementerian Sosial, Renstra BKKBN, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS Kota pekalongan, maka hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang pada Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

## **1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinsosp2kb antara lain :

### **3. Urusan Sosial**

- a) Belum optimalnya system pelayanan publik
- b) Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.
- c) banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.
- d) belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.
- e) Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

### **4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a) Belum optimalnya para penyelenggara kegiatan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan) oleh petugas.
- c) Perlu lebih besar lagi dukungan stakeholder, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan keluarga yg berketahanan.
- d) Cara kerja / sistem komando yg kurang sinkron antara OPD KB kabupaten kota dengan para penyuluh KB yg statusnya sebagai tenaga pusat.
- e) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

## **2. Peluang**

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi yang menyangkut urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melekat pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program pada urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan antara lain :

1. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
3. Terbukanya pengembangan kapasitas DINSOSP2KB melalui kerjasama dengan lembaga baik urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
5. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PMKS,
6. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
8. Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
9. Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.
10. Tercukupinya rasio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja;
2. Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur;

4. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
5. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan;
7. Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.;
8. Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
9. Peningkatan graduasi KPM PKH;
10. Optimalisasi database kemiskinan;
11. Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok rentan;
12. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Makam pahlawan;
13. Optimalisasi pendataan/updating data keluarga;
14. Penurunan angka kelahiran umur 15-19 tahun;
15. Peningkatan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
16. Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional maupun program SDGs (Sustainable Development Goals ).

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tabel T-B 35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah		
Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya sistem pelayanan publik	Belum optimalnya implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja		
		Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran		
		Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.		
	Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.		
		Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan		
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		
		Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik		
	Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	
Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PPKS( penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial/(gelandangan dan pengemis)				
Masih rendahnya graduasi KPM PKH				
Belum optimalnya database kemiskinan				
Belum optimalnya pemeliharaan sarpras pada Taman Makam Pahlawan				
masih tingginya angka TFR (Total Fertility Rate)			Belum optimalnya pencapaian peserta KB Aktif	Belum Optimalnya pendataan/updating data keluarga
				Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun masih tinggi



Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya peserta KB MKJP
		Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Jumlah PMKS di Kota Pekalongan pada Tahun 2020 sebanyak 24.302 Jiwa (sumber Dinsosp2kb Kota pekalongan), sedangkan total Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 sebanyak 307.150 Jiwa (sumber Kota Pekalongan Dalam Angka, 2021), dari data tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah PMKS di Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk yaitu sebesar 7.91 persen, data dan jenis PMKS di Kota Pekalongan adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 : Data PMKS Kota Pekalongan Tahun 2020

NO	JENIS PMKS	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Anak Jalanan (AJ)	58	40	98
2	Anak dengan Kedisabilitas	36	34	70
3	Lanjut Usia Terlantar	58	87	145
4	Penyandang Disabilitas	772	512	1.284
5	Pengemis	2	1	3
6	Pemulung	2	-	2
7	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (LP)	1	-	1
8	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	8		8
9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		8	8
10	Fakir Miskin (Desil 1)	18.634	4.049	22.683
<b>JUMLAH</b>		19.571	4.731	24.302

Sumber : Dinsosp2kb

Sedangkan untuk data pada pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3  
Data Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2018 – 2020

NO	Indikator	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Angka Kelahiran Total	2,245	2,112	2,166
2.	Persentase akseptor KB	61.33 %	65.06 %	69.02 %
3	Persentase Kepesertaan KB MKJP	21.37 %	20.51 %	19.30 %
4	Jumlah Kasus Perkawinan dibawah umur 20 th	299	388	245

Sumber : Dinsosp2kb

Dari urusan yang menjadi tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, baik itu urusan Sosial maupun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

### III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini diarahkan untuk mencapai Visi “**Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**”. Dengan visi ini, maka Kota Pekalongan pada periode RPJMD ini digambarkan sebagai Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan

Selain hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan.

#### Visi

**“ Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

**Kota Pekalongan** : adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya. Selain itu, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan.

**Lebih Sejahtera** : adalah Kondisi Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata.

**Lebih Mandiri** : adalah kemandirian yang masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan

ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

**Lebih Religius** : adalah kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

### **Misi**

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. misi yang harus diemban oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan;
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman;
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan;
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu Misi Ke 1, “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat”. dengan indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2) Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Desil 1
- 3) Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera (KS) diharapkan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mampu memberikan dorongan akselerasi tercapainya misi tersebut.

### **III.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota**

#### **1. Kementerian Sosial**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat.

Permasalahan mendasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu terkait dengan peningkatan kemampuan dasar penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang efisien dan bermutu masih

belum optimal. Dalam pelayanan dan perlindungan sosial di daerah terpencil dan tertinggal, daerah perbatasan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang terjadi disebabkan karena jumlah, kualitas, dan pemerataan SDM kesejahteraan sosial yang masih belum memadai. Adapun tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) tahun ke depan ialah, (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan antarwilayah; serta (ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif.

Cakupan program di daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah pengembangan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pelayanan yang diberikan di wilayah tersebut antara lain disebabkan jumlah dan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut diatas tantangan utama pembangunan kesejahteraan sosial pada lima tahun ke depan yaitu: 1. taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang masih rendah. 2. kualitas layanan yang belum berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial. 3. tata kelola serta birokrasi yang belum efektif. Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran pokok/utama pembangunan dalam (i) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (ii) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; (iii) revolusi mental dan pembangunan ke- budayaan; (iv) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (v) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan

perubahan iklim; (vi) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. Sasaran dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar.
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu.

Merujuk pada arah kebijakan Kementerian Sosial tahun 2020 – 2024, maka ada beberapa faktor yang menjadi tantangan/hambatan dan sekaligus peluang pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam melaksanakan kewenangannya.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan/hambatan antara lain :

1. Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.
2. banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.
3. belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.
4. Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

Faktor-faktor yang menjadi peluang antara lain :

1. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;
2. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
3. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PMKS,
4. Adanya program DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari kementerian Sosial dalam pengembangan/peningkatan database Kemiskinan
5. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.

## **2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; <sup>(1)</sup>Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan <sup>(2)</sup>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; <sup>(1)</sup>Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan



Kesehatan Reproduksi, dan <sup>(2)</sup>Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

Ditinjau dari arah kebijakan /strategi BKKBN tahun 2020 – 2024, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan/hambatan dan sekaligus peluang pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam melaksanakan kewenangannya.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan/hambatan antara lain :

1. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dalam masyarakat di Kota Pekalongan belum optimal.
2. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah.
3. Unmetneed masih tinggi.
4. Pencapaian Peserta aktif belum optimal.
5. Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

Faktor-faktor yang menjadi peluang antara lain :

1. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.

2. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
3. Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
4. Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.

#### **III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kota Pekalongan terkait pemanfaatan ruang kewilayahan, baik dari sisi pola dan struktur ruangnya maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis, karena berlokasi pada titik tengah jalur transportasi regional pantai Utara Jawa (jalan raya maupun rel kereta api) antara Kota Surabaya dan Jakarta serta “titik lelah” tol trans Jawa. Posisi strategis tersebut harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan peran Kota Pekalongan dalam konteks regional dan peningkatan daya saing, sehingga dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Sedangkan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kota Pekalongan telah terlampaui, namun masih terdapat kapasitas daya dukung dan daya tampung aspek tertentu dan kecamatan tertentu yang dapat dioptimalkan. Para pemangku kepentingan harus “secara bijaksana” menjadikan status lingkungan hidup Kota Pekalongan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan maupun pencapaian target TPB. Pertimbangan terhadap status lingkungan hidup, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan di Kota Pekalongan. Sesuai dengan UUPPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Aspek penting yang harus dicermati dan dijadikan masukan penting bagi Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang sekaligus menjadi hambatan/tantangan pada urusan sosial dan pengendalian penduduk adalah Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

### **III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Isu Strategis pada pelayanan urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

#### **1. Pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan

urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

## **2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu

## **3. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKKBN**

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Renstra pada BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
4. Meningkatkan advokasi dan Penggerakan Program Bangsa Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

#### **4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana

Meninjau RTRW Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan tersebut maka pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki peluang dalam mencapai Indikator Kinerja Penurunan Warga Miskin (DTKS) Desil 1.

#### **5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

Ditinjau dari kondisi lingkungan di Kota Pekalongan tersebut, maka pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

memiliki hambatan yang cukup besar terutama pada kondisi bencana rob yang menyebabkan banyaknya warga Kota Pekalongan yang terkena dampak rob yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terutama pada faktor KLHS dapat diketahui bahwa Isu yang muncul di Kota Pekalongan adalah pada permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

Dari keterangan tersebut di atas, maka Isu Strategis yang menjadi fokus penanganan pada Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tahun terencana adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berkewajiban melakukan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan DINSOSP2KB. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut:

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.67	79.92	80.17	80.42	80.67
			Nilai SAKIP OPD	71.50	73.00	74.50	76.00	77.50
2.	Meningkatkan Penanganan Penanganan Kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	1.0	1.0	2.0	2.5	3.0
			Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.32	3.43	3.55	3.68	3.82
3.	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Total fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2.164	2.162	2.160	2.158	2.156
			Persentase Pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.45	67.50	67.55	67.60	67.65

Sumber : <https://s.id/cascadingrenstrakotapkl>



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Sehingga dengan strategi tersebut pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilakukan dengan baik. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T-C.26 berikut :

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

<b>VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin
			Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar Panti	Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis))
		Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin	Peningkatan graduasi KPM PKH
		Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap	Optimalisasi Database kemiskinan
			Optimalisasi fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan

		darurat bencana (SPM)	
		Optimalisasi pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan pemeliharaan sarpras pada Taman Makam Pahlawan
Menurunkan Angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern	Optimalisasi pendataan/updating data keluarga
		Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Th	Penurunan angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun Peningkatan KB MKJP
		Penurunan Unmeetneed KB	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
<b>MISI 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pelayanan Publik	Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
			Meningkatkan dukungan administrasi Perkantoran
			Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras Aparatur
		Peningkatan Kinerja Organisasi	Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
			Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
			Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan program dan kegiatan merupakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi DINSOSP2KB Kota Pekalongan sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Pekalongan.

Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penerahan sumberdaya sebagai masukan (Outcome), untuk menghasilkan keluaran (Output) dari sekumpulan Sub Kegiatan. Sub Kegiatan merupakan merupakan penjabaran tindakan dari Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sub kegiatan di terpilih dari suatu Kegiatan, sedang Kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan DINSOSP2KB Kota Pekalongan sebagai bagian dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi kewenangan DINSOSP2KB.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyusun rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan, serta pendanaan Indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif disajikan sebagaimana tabel T-C.27 berikut :

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kota Pekalongan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	79.48	79.67		79.92		80.17		80.42		80.67		80.92		Dinsos P2KB	Pekalongan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat				Nilai SAKIP OPD	68.46	70.00		71.50		73.00		74.50		76.00		77.50		Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Daerah																			
		X.XX.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase keterseediaan laporan capaian kinerja	100	100	4.063.335.000	100	4.211.396.750	100	4.375.261.588	100	4.547.319.667	100	4.735.980.650	100	4.917.674.683	Dinsos P2KB	Pekalongan	
		X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat	100	100	25.850.000	100	17.850.000	100	17.850.000	100	17.850.000	100	25.850.000	100	17.850.000	Dinsos P2KB	Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				at daerah															
		X.XX.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun - Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun		2 dokumen	10.750.000	2 dokumen	2.750.000	2 dokumen	2.750.000	2 dokumen	2.750.000	2 dokumen	10.750.000	2 dokumen	2.750.000		
		X.XX.01	Koordinas	-		2	1.650.	2	1.650.	2	1.650.	2	1.650.	2	1.650.	2	1.650.	Dinsos	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		.2.01.02	i dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun		dokumen	000	dokumen	000	dokumen	000	dokumen	000	dokumen	000	dokumen	000	P2KB	longan
		X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun - Jumlah dokumen SAKIP		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	13.45 0.000	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	13.45 0.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				yang disusun (penetapan dan perubahan) - Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah - Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
						5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun															
		X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat	100	100	3.171.185.000	100	3.327.246.750	100	3.491.111.588	100	3.663.169.667	100	3.843.830.650	100	4.033.524.683	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				daerah															
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	3.121.235.000	14 bulan	3.277.296.750	14 bulan	3.441.161.588	14 bulan	3.613.219.667	14 bulan	3.793.880.650	14 bulan	3.983.574.683	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	48.300.000	12 Bulan	48.300.000	12 Bulan	48.300.000	12 Bulan	48.300.000	12 Bulan	48.300.000	12 Bulan	48.300.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan SKPD		1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.650.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tahun SKPD	yang disusun															
		X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	100	9.500.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota		2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	2 kali	9.500.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum</b>	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>Perangkat Daerah</b>	ketercapaian administrasi umum perangkat daerah															
		X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01	Penyediaan	-		12	90.00	12	90.00	12	90.00	12	90.00	12	90.00	12	90.00	Dinsos	Peka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		.2.06.02	n Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos - Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		bula n	0.000	bula n	0.000	bula n	0.000	bula n	0.000	bula n	0.000	bula n	0.000	P2KB	long an
		X.XX.01 .2.06.03	Penyediaan	Jumlah bulan		12 bula	5.000. 000	12 bula	5.000. 000	12 bula	5.000. 000	12 bula	5.000. 000	12 bula	5.000. 000	12 bula	5.000. 000	Dinsos P2KB	Peka long

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga		n		n		n		n		n		n			an
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		11 bulan	8.000.000	11 bulan	8.000.000	11 bulan	8.000.000	11 bulan	8.000.000	11 bulan	8.000.000	11 bulan	8.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengga		12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.XX.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.500.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar		242 kali	144.800.000	242 kali	144.800.000	242 kali	144.800.000	242 kali	144.800.000	242 kali	144.800.000	242 kali	144.800.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				daerah															
		X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan barang milik daerah		-		100 persen	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung /Bangunan Kantor		-	0	1 unit	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Persentase ketercapaian Penyedi		100	12.224.000.000	100	12.224.000.000	100	12.224.000.000	100	12.224.000.000	100	12.224.000.000	100	12.224.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>ahan Daerah</b>	aan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		X.XX.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber		12 bulan	148.000.000	12 bulan	148.000.000	12 bulan	148.000.000	12 bulan	148.000.000	12 bulan	148.000.000	12 bulan	148.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				daya air dan listrik															
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor		12 bulan	65.200.000	12 bulan	65.200.000	12 bulan	65.200.000	12 bulan	65.200.000	12 bulan	65.200.000	12 bulan	65.200.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik	100	100	16.658.400.000	100	16.658.400.000	100	16.658.400.000	100	16.658.400.000	100	16.658.400.000	100	16.658.400.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>Daerah</b>	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		X.XX.01 .2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/perasioanal yang terpelihara secara rutin/berkala		69 Unit	250.0 00.00 0	69 Unit	250.0 00.00 0	69 Unit	250.0 00.00 0	69 Unit	250.0 00.00 0	69 Unit	250.0 00.00 0	69 Unit	250.0 00.00 0	Dinsos P2KB	Pekalongan
		X.XX.01	Pemeliharaan	Jumlah		1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	Dinsos	Pekal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		.2.09.09	aan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		unit	0.000	unit	0.000	unit	0.000	unit	0.000	unit	0.000	unit	0.000	P2KB	ongan
		X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	18.900.000		
Meningkatkan				Persentase Penurunan	n/a	1.0		1.0		2.0		2.5		3.0		11.89		Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Pengangan Kemiskinan				nan Warga Miskin (DTKS)															
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menu runny			Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	n/a	3.21		3.32		3.43		3.55		3.68		3.82		Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	a Jumlah PPKS																			
		01.06.02	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	n/a	42	409.300.000	50	370.079.000	58	381.180.500	67	392.613.000	75	404.303.000	75	419.982.000	Dinsos P2KB	Pekalongan	
		1.06.02.2.01	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	n/a	10 Persen	150.300.000	10 Persen	154.809.000	10 Persen	159.453.000	10 Persen	164.235.000	10 Persen	169.162.000	10 Persen	177.162.000	Dinsos P2KB	Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan program KAT	Jumlah bulan pendampingan program KUBE		12 Bulan	150.300.000	12 Bulan	154.809.000	12 Bulan	159.453.000	12 Bulan	164.235.000	12 Bulan	169.162.000	177.162.000	12 Bulan	Dinsos P2KB	Pekalongan
		1.06.02.2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Presentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	n/a	75 Persen	259.000.000	75 Persen	215.270.000	75 Persen	221.727.500	75 Persen	228.378.000	75 Persen	235.141.000	75 Persen	242.820.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja	- Jumlah bulan Fasilitasi		12 bulan	84.000.000	0 bulan	86.520.000	0 bulan	89.115.000	0 bulan	91.788.000	0 bulan	94.541.000	0 bulan	97.520.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	pembinaan PSKS - Jumlah rakor pembinaan PSKS yang dilaksanakan		0 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali				
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenang	- Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS - Jumlah		12 Bulan	125.000.000	0 Bulan	128.750.000	0 Bulan	132.612.500	0 Bulan	136.590.000	0 Bulan	140.600.000	0 Bulan	145.300.000		Dinsos P2KB	Pekalongan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			an Kabupaten/Kota	TKSK yang difasilitasi																	
		1.06.02. 2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi hibah		2 Lembaga	50.00 0.000	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	Dinsos P2KB	Pekalongan	
		<b>01.06.04</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	Persentase penyana	n/a	100 Persen	1.687. 550.000	100 Persen	1.793. 550.000	100 Persen	1.793. 550.000	100 Persen	1.793. 550.000	100 Persen	1.793. 550.000	100 Persen	1.793. 550.000	100 Persen	1.793. 550.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				dang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				panti (SPM/IKK outcome)															
		1.06.04.2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis</b>	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan	n/a	100 Persen	1.617.550.000	100 Persen	1.723.550.000	100 Persen	1.723.550.000	100 Persen	1.723.550.000	100 Persen	1.723.550.000	100 Persen	1.723.550.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>di Luar Panti Sosial</b>	n sosial															
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	- Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 30kt yang mendapat bantuan sembako - Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako - Jumlah lansia yang		122 orang	377.200.000	122 orang	377.200.000	122 orang	377.200.000	122 orang	377.200.000	122 orang	377.200.000	122 orang	377.200.000		
						225 orang		225 orang		225 orang		225 orang		225 orang		225 orang			
						600 orang		600 orang		600 orang		600 orang		600 orang		600 orang			
																		Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				mendapat bantuan sembako																
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	- Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu - Jumlah Wanita Rawan Sosial yang mendapat pelatihan - Jumlah Pelayanan Anak Rentan Kesejahteraan Sosial		11 Orang	95.35 0.000	11 Orang	95.35 0.000	11 Orang	95.35 0.000	11 Orang	95.35 0.000	11 Orang	95.35 0.000	11 Orang	95.35 0.000		Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang dilayani		83 Orang	60.000.000	83 Orang	60.000.000	83 Orang	60.000.000	83 Orang	60.000.000	83 Orang	60.000.000	83 orang	60.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM - Jumlah fasilitasi kegiatan dalam peringatan Harlun - Jumlah keikutsertaan dalam kegtn HDI		12 bulan	1.085.000.000	12 bulan	1.191.000.000	12 bulan	1.191.000.000	12 bulan	1.191.000.000	12 bulan	1.191.000.000	12 bulan	1.191.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(Hari Disabilitas Internasional) - Jumlah Tenaga pendukung di RPSBM - Jumlah Tenaga profesional di RPSBM		25 org		25 org		25 org		25 org		25 org		25 org			
						5 org		5 org		5 org		5 org		5 org		5 org			
		1.06.04.2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan</b>	Persentase PPKS lainnya yang mendapat	n/a	3.32 Persen	70.000.000	3.43 Persen	70.000.000	3.55 Persen	70.000.000	3.68 Persen	70.000.000	3.82 Persen	70.000.000	3.98 Persen	70.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	pelayanan sosial di luar panti sosial															
		1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal		10 Pasa ng	70.00 0.000	10 Pasa ng	70.00 0.000	10 Pasa ng	70.00 0.000	10 Pasa ng	70.00 0.000	10 Pasa ng	70.00 0.000	70.0 00.0 00	10 Pasa ng	Dinsos P2KB	Pekalongan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Anak																	
		01.06.05	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	n/a	60,45 Persen	1.085.150.000	58,46 Persen	1.085.150.000	56,69 Persen	1.085.150.000	55,12 Persen	1.085.150.000	53,73 Persen	1.085.150.000	52,49 Persen	1.085.150.000	Dinsos P2KB	Pekalongan	
		1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten</b>	Persentase graduasi KPM PKH	n/a	10 Persen	1.085.150.000	10 Persen	1.085.150.000	10 Persen	1.085.150.000	10 Persen	1.085.150.000	10 Persen	1.085.150.000	10 Persen	1.085.150.000	Dinsos P2KB	Pekalongan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>/Kota</b>																
		1.06.0 5.2.02. 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah bulan fasilitas BPNT - Jumlah bulan pelayanan - SLRT Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun		12 bulan	736.6 50.00 0	12 bulan	736.6 50.00 0	12 bulan	736.6 50.00 0	12 bulan	736.6 50.00 0	12 bulan	736.6 50.00 0	12 bulan	736.6 50.00 0		
		1.06.0	Fasilitasi	-		12	348.5	12	348.5	12	348.5	12	348.5	12	348.5	12	348.5	Dinsos	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.2.02.03	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan pendampingan PKH - Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi		bulan	00.000	bulan	00.000	bulan	00.000	bulan	00.000	bulan	00.000	bulan	00.000	P2KB	longan
						200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang			
		01.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap	n/a	100 Persen	536.000	100 Persen	536.000	100 Persen	536.000	100 Persen	536.000	100 Persen	536.000	100 Persen	536.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)															
		1.06.06.2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	n/a	100 Persen	536.000.000	100 Persen	536.000.000	100 Persen	536.000.000	100 Persen	536.000.000	100 Persen	536.000.000	100 Persen	536.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		1.06.0	Penyediaa	Jumlah		1	500.0	1	500.0	1	500.0	1	500.0	1	500.0	1	500.0	Dinsos	Peka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.2.01.01	n Makanan	fasilitas kegiatan bantuan untuk korban bencana alam		Kegiatan	00.000	Kegiatan	00.000	Kegiatan	00.000	Kegiatan	00.000	Kegiatan	00.000	Kegiatan	00.000	P2KB	longan
		1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah bulan fasilitas bantuan sosial bagi kelompok rentan		12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		01.06.07	Program Pengelola an Taman	Persentase Pemelih	n/a	100 Persen	85.000.000	100 Persen	485.000.000	100 Persen	585.000.000	100 Persen	485.000.000	100 Persen	485.000.000	100 Persen	385.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>Makam Pahlawan</b>	araan Taman Makam Pahlawan															
		1.06.07.2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	n/a	100 Persen	85.000.000	100 Persen	485.000.000	100 Persen	585.000.000	100 Persen	485.000.000	100 Persen	485.000.000	100 Persen	385.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	- Jumlah bulan pemeliharaan		12 bulan	85.000.000	0 bulan	85.000.000	0 bulan	85.000.000	0 bulan	85.000.000	0 bulan	85.000.000	0 bulan	85.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Nasional Kabupaten/Kota	taman makam pahlawan - Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan		0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
Menurunnya Angka Total Fertility Rate				Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	2.166	2.164		2.162		2.160		2.158		2.156		2.154		Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(Angka Kelahiran Total)(IKK Outcome)				e)															
	Meningkatnya Kepeertaa n KB Aktif			Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Mode	67.35	67.4		67.45		67.5		67.55		67.6		67.65		Dinsos P2KB	Pekalongan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				rn Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)															
		02.14.02	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	n/a	100 persen	30.000.000	100 persen	76.000.000	100 persen	77.000.000	100 persen	78.000.000	100 persen	79.000.000	100 persen	80.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				a															
		2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase keterseediaan dokumen KKBP K (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembanguan Keluarga)	n/a	100 persen	30.000.000	100 persen	76.000.000	100 persen	77.000.000	100 persen	78.000.000	100 persen	79.000.000	100 persen	80.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		2.14.02.2.02.	Penyediaan Data dan	- Jumlah		14 doku	30.000.000	14 doku	76.000.000	14 doku	77.000.000	14 doku	78.000.000	14 doku	79.000.000	14 doku	80.000.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		11	Informasi Keluarga	dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun - Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun		men		men		men		men		men		men			an
						0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		02.14.03	<b>Program</b>	Penuru	n/a	8.2	2.902	8	2.621	7.8	2.971	7.6	2.601	7.4	2.601	7.2	2.641	Dinsos	Peka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	Indikator Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun		Persen	.069.000	Persen	.238.000	Persen	.469.000	Persen	.238.000	Persen	.238.000	Persen	.469.000	P2KB	longan
		2.14.0 3.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan</b>	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/A SFR 15-19)	n/a	9.72 Perseribu	1.854.994.000	9.22 Perseribu	1.854.994.000	9.22 Perseribu	1.854.994.000	8.73 Perseribu	1.854.994.000	8.24 Perseribu	1.854.994.000	7.74 Perseribu	1.854.994.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>Budaya Lokal</b>	(IKK Output)															
		2.14.0 3.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	- Jumlah masyarakat yang diberikan informasi penggunaan keluarga kependudukan dan keluarga berencana		51 Kelo mpok	110.0 00.00 0	51 Kelo mpok	110.0 00.00 0	51 Kelo mpok	110.0 00.00 0	51 Kelo mpok	110.0 00.00 0	51 Kelo mpok	110.0 00.00 0	51 Kelo mpok	110.0 00.00 0	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				melalui penyuluhan langsung															
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB		12 Bulan	1.744.994.000	12 Bulan	1.744.994.000	12 Bulan	1.744.994.000	12 Bulan	1.744.994.000	12 Bulan	1.744.994.000	12 Bulan	1.744.994.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrase</b>	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan	n/a	19.8 Persen	1.047.075.000	20 Persen	766.244.000	20.2 Persen	1.116.475.000	20.4 Persen	746.244.000	20.6 Persen	746.244.000	20.8 Persen	786.475.000	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>psi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	pemutakhiran basis data keluarga Indonesia															
		2.14.0 3.2.03. 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan		11 Unit	775.0 00.00 0	83 Unit	479.7 69.00 0	20 Unit	830.0 00.00 0	12 Unit	459.7 69.00 0	5 Unit	459.7 69.00 0	30 unit	500.0 00.00 0	Dinsos P2KB	Pekalongan
		2.14.0	Dukungan	Jumlah		400	272.0	440	286.4	480	286.4	520	286.4	560	286.4	286.	560	Dinsos	Peka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.2.03.11	Operasional Pelayanan KB Bergerak	PUS dari Keluarga Miskin yang mendapat pelayanan KB		Orang	75.000	Orang	75.000	Orang	75.000	Orang	75.000	Orang	75.000	475.000	Orang	P2KB	longan
		02.14.04	<b>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)</b>	Unmeet need KB	n/a	17 Persen	171.850.000	16 Persen	175.450.000	15 Persen	175.450.000	14 Persen	175.450.000	13 Persen	175.450.000	12 Persen	175.450.000	Dinsos P2KB	Pekalongan
		2.14.04.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Perai</b>	Persentase Pelaksanaan	n/a	100 Persen	171.850.000	100 Persen	175.450.000	100 Persen	175.450.000	100 Persen	175.450.000	100 Persen	175.450.000	100 Persen	175.450.000	Dinsos P2KB	Pekalongan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			<b>Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat arakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Peminan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
		2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan	Jumlah kegiatan/fasilitas PPKBD, KKB, Kelompok Kegiatan, Rumah Data Kependudukan dan PPKS	3 Kegiatan	171.850.000	5 Kegiatan	175.450.000	5 Kegiatan	175.450.000	5 Kegiatan	175.450.000	5 Kegiatan	175.450.000	175.450.000	5 Kegiatan	3 Kegiatan	Dinsos P2KB	Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UKPKS)																

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi DINSOSP2KB yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel T-C.28 : Indikator Kinerja  
 Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Pada Awal RPJMD		Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP OPD	68.46	70.00	71.5	73.00	74.50	76.00	77.50	77.50
2	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	n/a	3.21	3.32	3.43	3.55	3.68	3.82	3.82
3	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.35	67.4	67.45	67.5	67.55	67.6	67.65	67.65

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan DINSOSP2KB Kota Pekalongan yang memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dalam kondisi lingkungan strategis tertentu.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka diperlukan komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya agar semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang dijalankan oleh DINSOSP2KB diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kota Pekalongan serta masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sehat, mandiri dan Sejahtera.

Pekalongan, September 2021

Plt. Kepala Dinas Sosial,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Pekalongan



**Ir. Budiyanto, M.Pi, M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630804 198711 1 001